

## BATASAN USIA DAN KESEJAHTERAAN LANSIA

Lukman Nul Hakim

13

### Abstrak

*Batasan usia lanjut usia (lansia) merupakan salah satu isu penting saat Rapat Koordinasi Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BKD Setjen DPR RI pada 5 September 2020. Penentuan batasan usia lansia terkait dengan batasan usia pensiun dan batasan penerima bantuan sosial lansia. Tulisan ini bertujuan mengkaji faktor-faktor penting dalam menentukan batasan usia lansia beserta dampak kesejahteraan yang ditimbulkan. Terdapat dua pendapat mengenai batasan usia lansia, yaitu ditingkatkan menjadi lebih dari 60 tahun atau tetap 60 tahun. Dengan mempertimbangkan kajian teoretis, pendapat pakar, dan faktor kesejahteraan lansia itu sendiri, maka akan lebih tepat jika Indonesia tetap menggunakan batasan usia 60 tahun. Dalam menghadapi fenomena peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) maka yang mendesak untuk dilakukan negara adalah mempersiapkan segala hal agar para lansia terjamin kehidupannya dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum, fasilitas infrastruktur, dan prioritas pelayanan. Komisi VIII DPR RI perlu mempertimbangkan berbagai masukan batasan usia lansia termasuk dampak kesejahteraan yang ditimbulkannya.*

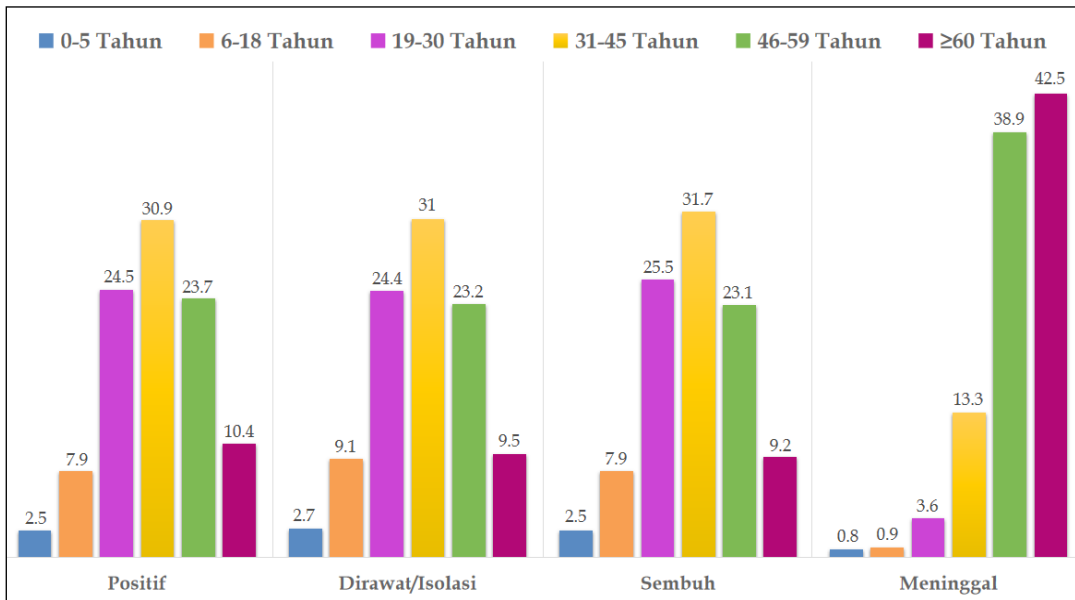
### Pendahuluan

Pada tanggal 5 September 2020 lalu telah dilakukan Rapat Koordinasi Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BKD Setjen DPR RI terkait perumusan revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (RUU Lansia). Anggota Dewan sepakat bahwa revisi UU Lansia harus memenuhi tujuan negara Indonesia seperti termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

UU Lansia menjadi penting untuk dibahas guna memberikan perlindungan pada kelompok yang paling rentan terhadap perubahan fungsi tubuh baik fisik maupun mental; perubahan sosial; dan perubahan ekonomi. Terlebih kerentanan lansia saat ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia.





**Grafik 1. Persentase Kasus Terkonfirmasi Positif, Dirawat/Isolasi, Sembuh, dan Meninggal dalam Berbagai Kelompok Usia**

(Sumber: <https://covid19.go.id/peta-sebaran>)

Walaupun Covid-19 lebih banyak menginfeksi kelompok usia produktif, namun kasus kematian karena Covid-19 tertinggi ada pada batasan kelompok usia lebih dari 60 tahun.

Salah satu isu yang banyak dibahas pada rapat Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BKD Setjen DPR RI adalah tentang batasan usia lansia. Pada rapat tersebut terdapat dua pendapat mengenai batasan usia lansia, yaitu ditingkatkan atau tetap 60 tahun. Sebagian orang berpendapat bahwa idealnya batasan usia lansia ditingkatkan seiring dengan meningkatnya UHH masyarakat Indonesia. Sebagian lagi memandang bahwa yang ideal belum tentu tepat pada konteks waktu saat ini. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan mengkaji faktor-faktor penting dalam menentukan batasan usia lansia beserta implikasi dari masing-masing batasan usia lansia tersebut.

### Batasan Usia Lansia:

#### Ditingkatkan vs Status Quo

Menurut data BPS dalam waktu hampir lima dekade (1971–2019) di Indonesia telah terjadi peningkatan sekitar dua kali lipat populasi lansia, sehingga persentase lansia menjadi 9,6% atau sekitar 25,64 juta orang (BPS, 2019). Sementara ambang batas sebuah negara disebut sebagai negara dengan struktur penduduk tua (*ageing population*) adalah jika telah lebih dari 10%. Menurut Bloom, Canning, dan Malaney (1999) besarnya populasi lansia tersebut merupakan masa bonus demografi kedua. Bonus demografi adalah sebuah kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari jumlah penduduk usia nonproduktif (Hakim, 2020). Jika pada masa bonus demografi pertama yang memainkan peran utama adalah penduduk usia produktif, maka pada masa bonus demografi kedua yang lebih

berperan adalah lansia (solopos.com, 14 September 2019). Bonus demografi kedua akan berdampak positif jika lansia sehat dan mandiri, dan akan berdampak negatif jika kebalikannya. Jika batasan usia lansia dibuat lebih tinggi dari 60 tahun, maka dapat berdampak pada peningkatan usia pensiun pegawai. Hal ini diharapkan akan menghadirkan lansia yang lebih mandiri secara ekonomi.

Namun di sisi lain, beberapa pakar berpendapat bahwa batasan usia lansia sebaiknya tetap 60 tahun [Tukino (2020), Cicih (2020), Lestari (2020)]. Pakar Kesejahteraan Sosial dari STKS, Tukino (2020) menekankan bahwa sampai saat ini secara teoretis usia yang masih dijadikan batasan sebagai lansia adalah usia 60 tahun. Tukino (2020) merujuk pada kategorisasi usia dari pakar psikologi perkembangan Hurlock (2001) yang menyatakan bahwa batasan lansia yaitu 60 tahun sampai meninggal. Sementara Lestari (2020) menambahkan bahwa para peneliti sejauh ini masih sepakat menggunakan usia 60 tahun dalam berbagai alat ukur seperti yang digunakan pada WHOQoL *Bref for older people, Age-friendly cities, Successful ageing, Activity daily life and instrumental daily life (ADL and IADL)*.

### **Faktor Penting Penentu Batasan Usia Lansia**

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penentuan batasan usia lansia. *Pertama*, peningkatan UHH masyarakat Indonesia yang semestinya diiringi dengan peningkatan batasan usia lansia. Namun peningkatan tersebut akan berdampak pada meningkatnya usia

pensiun pegawai. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan tingkat pengangguran tinggi, maka apabila banyak pekerjaan yang seharusnya ditempati oleh orang yang muda namun diberikan kepada lansia maka akan meningkatkan pengangguran di kalangan orang muda.

Argumen yang membandingkan kondisi di Indonesia dengan negara lain seperti Singapura tidak tepat karena jumlah populasinya jauh berbeda. Menurut laporan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) angka kelahiran di Indonesia setiap tahun setara dengan jumlah penduduk Singapura (newsdetik.com, 29 September 2015), bahkan tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2018 yaitu 5,3% setara dengan jumlah penduduk Singapura secara keseluruhan (liputan6.com, 10 April 2019).

UHH masyarakat Indonesia memang telah semakin meningkat, akan tetapi secara umum belum diiringi dengan lansia yang berkualitas, baik dari sisi ekonomi, kesehatan maupun pendidikan, serta belum merata di seluruh Indonesia. Faktanya BPS (2019) menemukan bahwa satu dari empat lansia Indonesia mengalami sakit; meskipun UHH meningkat menjadi 71,5 tahun namun Angka Harapan Hidup Sehat di usia 62,7 tahun; dan sebanyak 3,7% (941.478 orang) lansia membutuhkan perawatan jangka panjang. BPS (2019) juga menemukan bahwa secara ekonomi, satu dari dua lansia masih bekerja; empat dari sepuluh rumah tangga lansia belum mapan secara ekonomi, dan mayoritas lansia bekerja di sektor informal.

*Kedua*, lansia merupakan kelompok yang rentan ketika terjadi bencana baik bencana alam maupun bencana nonalam seperti pandemi Covid-19 yang saat ini sedang terjadi. Lansia yang tidak mandiri secara fisik dan ekonomi sangat membutuhkan bantuan negara. Peningkatan batasan usia menjadi 65 tahun akan mengakibatkan berbagai program bantuan untuk lansia menysasar pada masyarakat yang berusia 65 tahun ke atas, sehingga masyarakat yang berusia 60 hingga 64 tahun yang sebelumnya mendapatkan bantuan menjadi tidak lagi berhak mendapat bantuan dari pemerintah.

*Ketiga*, berbagai teoretis sejauh ini masih menggunakan batasan usia 60 tahun untuk kelompok lansia. *Keempat*, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menganggap batasan usia lansia 60 tahun masih relevan untuk digunakan hingga saat ini. PBB membedakan batasan usia lansia pada negara maju dan negara berkembang. Di negara berkembang, batasan yang digunakan adalah usia 60 tahun sementara di negara maju batasan yang digunakan adalah 65 tahun dan lebih (WHO, 2013). Sesungguhnya World Trade Organization (WTO) baru saja mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang dan masuk dalam negara maju yaitu mulai tanggal 10 Februari 2020. Indonesia bersama negara seperti Argentina, Brasil, India dan Afrika Selatan dikeluarkan dari daftar negara berkembang. Namun penetapan oleh WTO atas usulan Kantor Perwakilan Perdagangan atau *Office of the United State Trade Representative* (USTR) ini memicu

perdebatan. Hal ini dikarenakan argumen yang disampaikan hanya terkait indikator keikutsertaan dalam negara-negara G20. Dalam pertimbangan yang digunakannya, USTR mengabaikan indikator negara berkembang lainnya seperti angka kematian bayi, angka buta huruf orang dewasa, dan harapan hidup saat lahir (money.kompas.com, 22 Februari 2020). Bahkan pada konteks Afrika Selatan, USTR juga mengabaikan pendapatan nasional bruto per kapita yang masih tergolong sebagai negara berkembang.

Berbagai pertimbangan tersebut meyakinkan bahwa peningkatan batasan usia lansia lebih banyak memberikan dampak yang negatif daripada positif baik untuk lansia itu sendiri maupun untuk angkatan usia kerja lainnya. Walaupun UHH Indonesia meningkat, namun belum diikuti dengan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan derajat kesehatan lansia. Negara harus memberikan respons yang tepat dalam menghadapi meningkatnya UHH masyarakat Indonesia tersebut, dan respons itu bukan berupa peningkatan batasan usia lansia.

## Penutup

Berdasarkan beberapa faktor yang memengaruhi penentuan batasan usia lansia serta pertimbangan hak-hak dan kesejahteraan lansia, termasuk upaya negara dalam melindungi lansia baik pada saat pandemi maupun nonpandemi, maka saat ini Indonesia lebih tepat jika masih menggunakan batasan usia 60 tahun. Dalam menghadapi fenomena peningkatan UHH, yang mendesak

untuk dilakukan negara adalah mempersiapkan segala hal agar para lansia terjamin kehidupannya dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum, fasilitas infrastruktur, dan prioritas pelayanan.

Beberapa hal yang dapat dilakukan DPR RI khususnya Komisi VIII secara jangka pendek yaitu mendorong pemerintah untuk berupaya memenuhi hak-hak lansia dalam hal sarana, prasarana, dan prioritas pelayanan. Secara jangka panjang DPR RI dapat mendorong pemerintah melalui revisi UU Lansia untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami bahwa kondisi seseorang pada masa lansia sangat dipengaruhi oleh gaya hidup sejak masa anak-anak. Edukasi yang berhasil akan menghasilkan lansia Indonesia yang mandiri, bahagia, dan bermartabat.

### Referensi

Bahan Rapat Koordinasi Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BKD Setjen DPR RI terkait perumusan revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pada 5 September 2020.

“BKKBN laju pertumbuhan penduduk indonesia setara jumlah penduduk singapura”, 29 September 2015, <https://news.detik.com/berita/d-3030666/bkkbn-laju-pertumbuhan-penduduk-indonesia-setara-jumlah-penduduk-singapura>, diakses 20 September 2020.

Bloom, D., Canning, D., & Malaney, P. N. 1999. *Demographic change and economic growth in Asia*. CID Working Paper Series.

BPS. 2019. *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Cicuh, L.H.M. 2020. Wawancara dilakukan pada 28 September 2020.

Hakim, L. N. 2020. Urgensi Revisi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, Vol. 11, No.1, hal. 43-55.

Hurlock, E. B. 2001. *Developmental psychology*. Tata McGraw-Hill Education.

“Indonesia Masuk Negara Maju atau Berkembang? Ini Penjelasan WTO”, 22 Februari 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/02/22/11525242/indonesia-masuk-negara-maju-atau-berkembang-ini-penjelasan-wto?page=all>, diakses 20 September 2020.

“Jumlah Pengangguran di Indonesia setara Total Penduduk Singapura”, 10 April 2019, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3938675/jumlah-pengangguran-di-indonesia-setara-total-penduduk-singapura>, diakses 20 September 2020.

Lestari, M.D. 2020. Wawancara dilakukan pada 11 Februari 2020.

“Meraih Bonus Demografi Kedua”, 14 September 2019, <https://www.solopos.com/meraih-bonus-demografi-kedua-1017790>, diakses 30 Mei 2020.

“Peta Sebaran”, 14 Oktober 2020, <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses 14 Oktober 2020.

“Sri Mulyani Pastikan RI Resesi Ekonomi di Akhir September”, 22 September 2020, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5183135/sri-mulyani-pastikan-ri-resesi-di-akhir-september-2020>, diakses 25 September 2020.

Statistik, B. P. 2019. *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019*. Jakarta: BPS.

Tukino. 2020. Wawancara dilakukan pada 31 Agustus 2020.

World Health Organization. 2013. Expert Meeting on Population Sodium Reduction Strategies for Prevention and Control of Noncommunicable Diseases in the South-East Asia Region, 11-13 December 2012 (No. SEA-NCD-88). World Health Organization. Regional Office for South-East Asia.



Lukman Nul Hakim  
*lukman.nulhakim@dpr.go.id*

Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA., menyelesaikan pendidikan S3 Ilmu Psikologi dari Universitas Indonesia pada tahun 2018, S2 Master of Arts in Psychology dari University of Jamia Millia Islamia pada tahun 2007, dan S1 Ilmu Psikologi dari Universitas Indonesia pada tahun 2002. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Psikologi pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Disertainya berjudul “Pengaruh *Conscientiousness*, *Extraversion*, dan Kompetisi Terhadap Pengambilan Keputusan Kelompok”. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku dan jurnal antara lain: “Pengaruh Intensitas Mengikuti Informasi Terorisme terhadap Sikap Mengenai Terorisme” (2010), “Meningkatkan Kualitas Perguruan Tinggi Lokal melalui Internasionalisasi Pendidikan Tinggi” (2013), dan “Ulasan Konsep: Indijinuisasi Ilmu Psikologi” (2014).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.